



Transformasi Kebijakan Fiskal Berbasis Syariah : Mendorong Keadilan Sosial dan Pertumbuhan Inklusif di Indonesia

Putri Ayu Manalu^{1*}, Nazwa Tantri Fitria², Ahmad Wahyudi Zein³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Alamat: Jl. IAIN No. 1 Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20235.

Korespondensi penulis: ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id

Abstract. *In the framework of Islamic economics, which places a strong emphasis on social justice and ethics, fiscal policy is crucial in controlling a nation's economy. The necessity to comprehend how fiscal policy can be executed in line with sharia principles in order to attain public welfare serves as the backdrop for this study. This study's goal is to investigate the connection between Islamic economics and fiscal policy and evaluate how it affects the general welfare. The approach is library research, which involves gathering and examining a variety of works pertaining to Islamic economics' fiscal policy. The findings demonstrate how fiscal policies rooted in Islamic principles, like zakat and charity, can promote equitable and inclusive economic growth. In the Islamic system, fiscal policy fosters social and spiritual peace in addition to financial welfare. To sum up, fiscal policies that adhere to sharia principles can establish a just, durable, and advantageous economic structure that benefits all societal levels. Therefore, in order to attain economic stability and overall welfare, it is crucial that the government execute fiscal policies that are consistent with Islamic beliefs.*

Keywords: *economic growth, economic instruments, fiscal policy, Islamic economics*

Abstrak. Dalam kerangka ekonomi Islam, yang menekankan kuat pada keadilan sosial dan etika, kebijakan fiskal memegang peranan penting dalam mengendalikan perekonomian suatu negara. Kebutuhan untuk memahami bagaimana kebijakan fiskal dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah guna mencapai kesejahteraan umum menjadi latar belakang penelitian ini. Tujuan studi ini adalah untuk menyelidiki hubungan antara ekonomi Islam dan kebijakan fiskal serta mengevaluasi dampaknya terhadap kesejahteraan umum. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian perpustakaan, yang melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai karya yang berkaitan dengan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Temuan menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang berakar pada prinsip-prinsip Islam, seperti zakat dan sedekah, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan inklusif. Dalam sistem Islam, kebijakan fiskal tidak hanya mendorong kesejahteraan finansial tetapi juga kedamaian sosial dan spiritual. Singkatnya, kebijakan fiskal yang sesuai dengan prinsip syariah dapat membangun struktur ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan menguntungkan bagi semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencapai stabilitas ekonomi dan kesejahteraan secara keseluruhan, sangat penting bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan fiskal yang sesuai dengan keyakinan Islam.

Kata kunci: pertumbuhan ekonomi, instrumen ekonomi, kebijakan fiskal, ekonomi Islam

1. PENDAHULUAN

Kebijakan fiskal merupakan alat yang digunakan pemerintah untuk mengawasi dan mengelola perekonomian suatu negara melalui pemungutan pajak dan pengeluaran dalam kerangka perekonomian modern. Namun, dari perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal harus mempertimbangkan keadilan sosial dan pertimbangan etis yang tercermin dalam hukum Syariah, selain upaya memaksimalkan pertumbuhan ekonomi.

Pengembangan kebijakan fiskal didasarkan pada ekonomi Islam, yang menekankan nilai redistribusi kekayaan, transparansi, dan larangan riba. Mengingat prinsip-prinsip ini, sangat penting untuk meneliti bagaimana kebijakan fiskal dapat diterapkan secara efektif di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim, sehingga mendorong

pengembangan kesejahteraan bagi semua sektor masyarakat. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketidaksetaraan sosial, pemerintah menggunakan kebijakan fiskal sebagai alat untuk mengendalikan ekonomi melalui perpajakan dan pengeluaran.

Biasanya, pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai program-program vital seperti infrastruktur dan pendidikan. Nilai-nilai Syariah, yang memprioritaskan keadilan sosial, keseimbangan material dan spiritual, serta larangan riba, menjadi landasan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Zakat, infak, sedekah, kharaj, dan jizyah merupakan alat utama kebijakan fiskal Islam; zakat digunakan untuk mendistribusikan kekayaan dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Zakat telah terbukti meningkatkan pendapatan penerima dan menurunkan tingkat kemiskinan. Untuk sepenuhnya mewujudkan potensinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil, pengelolaan zakat masih perlu ditingkatkan. Kebijakan fiskal Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera dengan memupuk harmoni sosial dan spiritual selain kesejahteraan material.

2. KAJIAN TEORITIS

Al-Qur'an dan Hadis menjadi landasan normatif bagi kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, yang didukung lebih lanjut oleh pemikiran para ulama klasik seperti Abu Ubayd, Al-Mawardi, dan Ibn Khaldun. Mereka memandang negara sebagai organisasi yang bertugas mengelola sumber daya secara adil dan bertanggung jawab guna menjamin kesejahteraan rakyat. Beberapa alat fiskal, termasuk usyur (pajak bea cukai atas perdagangan), jizyah (pajak atas non-Muslim), dan kharaj (pajak tanah), diberlakukan tidak hanya untuk mengumpulkan dana negara tetapi juga untuk menjaga harmoni sosial dan mencegah konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang. Menurut teori ekonomi Islam kontemporer, kebijakan fiskal juga harus menghindari perilaku tidak adil dan eksploitatif seperti riba dan manipulasi pasar. Kebijakan fiskal yang bertujuan melindungi agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda ditentukan oleh prinsip maqashid syariah, atau tujuan syariah. Oleh karena itu, teori kebijakan fiskal Islam tidak hanya mencakup prinsip-prinsip ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan seluruh aspek etika dan spiritual yang diperlukan untuk menciptakan masyarakat sipil yang kaya dan bermoral.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggabungkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metodologi penelitian perpustakaan. Informasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber akademik yang relevan, termasuk buku, jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan dokumen kebijakan yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir. Literatur dipilih berdasarkan kriteria inklusi, yang mencakup sumber-sumber yang membahas kebijakan fiskal dalam kerangka ekonomi Islam, mengandung analisis teoretis atau empiris yang relevan, dan diterbitkan oleh penerbit akademik yang terpercaya. Literatur yang hanya membahas kebijakan fiskal dari sudut pandang tradisional atau yang tidak memenuhi standar akademik seperti posting blog dan sumber dengan kutipan yang tidak jelas dikeluarkan. Setelah pengumpulan data, pendekatan tematik digunakan untuk menganalisis data. Hal ini melibatkan identifikasi dan klasifikasi tema-tema utama yang muncul, termasuk perbedaan antara sistem fiskal Islam dan konvensional, kontribusi instrumen syariah terhadap pertumbuhan ekonomi, dan strategi fiskal untuk mengurangi ketimpangan. Analisis perbandingan juga digunakan untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan fiskal konvensional dan syariah berbeda dalam hal tujuan, prinsip, dan efektivitasnya. Dengan menggunakan metode ini, studi ini secara teoritis diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana kebijakan fiskal Islam berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbedaan Kebijakan Fiskal Islam dengan Sistem Konvensional

Menurut pandangan ekonomi tradisional, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penggunaan pajak, pinjaman publik, dan pengeluaran publik untuk kemajuan dan stabilitas masyarakat. Hal ini dilakukan dengan menggunakan alat pengeluaran publik dan perpajakan untuk menciptakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik dan berkelanjutan. Kesetaraan pendapatan dan kesejahteraan merupakan tujuan utama dari kebijakan fiskal.

Pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan material seringkali menjadi tujuan utama kebijakan fiskal konvensional. Mencapai stabilitas makroekonomi, meningkatkan lapangan kerja, dan mengurangi ketimpangan ekonomi melalui redistribusi pendapatan merupakan tujuannya. Di sisi lain, strategi fiskal sistem Islam didasarkan pada prinsip-prinsip Syariah, yang memprioritaskan keadilan sosial dan menyeimbangkan antara kepentingan material dan spiritual. Dalam kebijakan fiskal Islam, zakat, sedekah, infaq, kharaj, jizyah, dan usyur

merupakan alat utama. Misalnya, Muslim yang memiliki kekayaan melebihi nisab (batas minimum kekayaan yang wajib zakat) diwajibkan membayar zakat. Zakat berfungsi sebagai sarana redistribusi kekayaan untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial dan memastikan semua orang dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dalam hal ini, kebijakan fiskal Islam memprioritaskan kesejahteraan spiritual dan moral komunitas selain kesejahteraan materialnya. Instrument kebijakan fiskal islam:

a. Zakat

Alat utama kebijakan fiskal Islam adalah zakat, yang diwajibkan bagi umat Muslim yang memiliki harta melebihi nisab (ambang batas minimum). Tujuan utama zakat adalah untuk mendistribusikan kekayaan dan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan sosial. Zakat juga terbukti dapat meningkatkan pendapatan penerima dan mengurangi kemiskinan di Indonesia. Misalnya, meskipun pengumpulan zakat pada tahun 2022 hanya mencapai sekitar Rp26,2 triliun, data dari BAZNAS pada tahun 2023 menunjukkan bahwa zakat berpotensi menghasilkan hingga Rp327,6 triliun per tahun.

b. Infak

Infak adalah pemberian harta secara ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah, tidak ada batasan waktu atau keuangan. Menurut kebijakan fiskal Islam, infak merupakan bentuk solidaritas sosial yang dapat diterapkan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama kaum miskin, serta kemakmuran ekonomi komunitas. Infak diklasifikasikan sebagai salah satu produk keuangan yang diperdagangkan secara publik dengan landasan spiritual.

c. Sedekah

Sedekah juga berfungsi sebagai sukarela, mirip dengan infak, tetapi lebih substansial dan dapat berupa barang atau barang. Sedekah dianggap sebagai spiritualitas sosial dan kasih sayang dalam agama Islam. Dalam kebijakan fiskal Islam, sedekah mendorong kesetaraan ekonomi dan keadilan sosial sekaligus berkontribusi pada harmoni sosial dan pengembangan karakter.

d. Kharaj

Kharaj adalah pajak yang dikenakan atas tanah milik negara yang diberikan kepada individu non-Muslim untuk digarap. Pajak ini berbeda dengan zakat dan dikenakan berdasarkan produktivitas tanah. Dalam ekonomi Islam, kharaj digunakan sebagai sumber pendapatan negara dan dimaksudkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan tanpa merugikan pemiliknya.

e. Jizyah

Jizyah adalah pajak yang dikenakan kepada non-Muslim yang tinggal di negara Islam sebagai kompensasi atas perlindungan dan pelayanan yang diberikan negara kepada mereka. Pajak ini tidak dikenakan pada Muslim, dan sebagai gantinya Muslim membayar zakat. Jizyah mencerminkan sistem fiskal Islam yang inklusif namun tetap adil, karena tidak membebani kelompok berdasarkan kepercayaan mereka secara berlebihan.

Analisis Fiskal dalam Menilai Pembangunan Ekonomi Indonesia

Langkah pertama dalam rencana kebijakan fiskal Islam pemerintah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disusun berdasarkan hirarki kebutuhan, dari yang paling penting sampai yang tidak penting, untuk memaksimalkan pendapatan negara dan mencegah defisit. Kedua, larangan Al-Quran terhadap pemborosan dan kelebihan berfungsi sebagai dasar untuk penggunaan dana publik secara efisien. Akuntansi Islam mempersiapkan anggaran negara sesuai dengan kebutuhan, mengabaikan persyaratan saldo nol jika bertentangan dengan hukum syariah. Ketiga, anggaran negara memprioritaskan pertumbuhan ekonomi makro, tetapi juga mengatasi kesenjangan ekonomi dengan mengalokasikan uang tunai dan memenuhi kebutuhan dasar, yang merupakan tugas pemerintah dalam ekonomi Islam, selain itu, pemerintah Indonesia dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk melaksanakan berbagai rencana. Strategi melalui kebijakan fiskal yaitu:

- a. Mengelola anggaran untuk mencari proyek yang memberikan banyak nilai bagi perekonomian guna mengurangi pengeluaran negara. Dan berkonsentrasi pada bidang-bidang penting seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
- b. Memodernisasi sistem perpajakan agar lebih adil dan efisien, termasuk menurunkan pajak pada industri yang memiliki ruang ekspansi yang signifikan.
- c. Memberikan bantuan penuh kepada pelaku usaha (UMKM) dengan memberikan bantuan keuangan dalam bentuk pinjaman atau subsidi kepada Usaha Kecil Menengah (UMKM) yang berpotensi menjadi mesin pembangunan fiskal.
- d. Untuk menghindari ketidakstabilan ekonomi, mengoptimalkan anggaran dengan mengendalikan pendapatan dan pengeluaran. Oleh karena itu, pemerintah harus memprioritaskan kebutuhan penting agar pengeluaran tetap berada di bawah pendapatan negara.

- e. Mengembangkan sumber daya manusia dengan menawarkan layanan kesejahteraan masyarakat dan kesehatan. Dengan menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan bagi masyarakat untuk menyelidiki gagasan atau ide yang menarik, sikap masyarakat didorong untuk menjadi inventif dan kreatif.

Kebijakan fiskal indonesia

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan kebijakan fiskal di Indonesia harus mampu mengendalikan inflasi untuk mencegah terjadinya krisis moneter dan menciptakan perekonomian yang tumbuh secara signifikan dan stabil. Kebijakan fiskal yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Inflasi akan dapat dikendalikan secara efektif apabila anggaran digunakan pada waktu dan tempat yang tepat, yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi secara makro. Sistem kebijakan fiskal Negara Indonesia telah dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23:

- a. Sebagai wujud pengelolaan keuangan negara, anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan dengan undang-undang setiap tahun dan dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan masukan Dewan Perwakilan Daerah.
- c. Jika Dewan Perwakilan Rakyat menolak rancangan anggaran negara yang diajukan oleh Presiden, pemerintah akan melaksanakan anggaran negara dari tahun sebelumnya.
- d. Pajak dan biaya lain yang diwajibkan untuk kepentingan pemerintah diatur oleh undang-undang.
- e. Undang-undang mengatur tentang jenis dan nilai mata uang.

Indonesia memiliki sistem penilaian mandiri untuk pengumpulan pajak, di mana masyarakat sepenuhnya dipercaya untuk menentukan, membayar, dan melaporkan pajak mereka sendiri. Sistem pajak penghasilan progresif, di mana besaran pajak yang dibayarkan meningkat seiring dengan kenaikan penghasilan wajib pajak, merupakan contoh bagaimana keadilan dan kesetaraan diwujudkan dalam sistem pemungutan pajak.

Penerimaan pajak juga mengakui pembebasan pajak dan penghasilan bebas pajak, yang tidak dikenakan pajak. Hal ini berarti ada standar tertentu mengenai apa yang dikenakan pajak dan apa yang tidak. Pajak tidak berlaku untuk aset yang dimiliki oleh negara atau masyarakat.

Peluang dan tantangan

a. Peluang

1) Potensi Ekonomi yang Signifikan

Karena jumlah penduduknya yang besar dan kekayaan sumber daya alamnya, negara-negara berkembang seperti Bangladesh, Kenya, dan Indonesia memiliki potensi pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Misalnya, sumber daya alam Indonesia yang melimpah dapat membantu pendapatan ekspor negara tersebut.

2) Populasi yang Menguntungkan

Negara ini memiliki peluang untuk meningkatkan konsumsi dan produksi dalam negeri karena sebagian besar warganya berada dalam usia kerja. Potensi demografi ini dapat dimaksimalkan dan mendorong pertumbuhan yang inklusif jika kebijakan fiskal difokuskan pada peningkatan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja.

3) Kemungkinan Diversifikasi Ekonomi

Langkah-langkah fiskal yang mendorong keragaman ekonomi dapat mengurangi ketergantungan pada industri tertentu. Indonesia dapat mengembangkan sektor industri dan digitalnya.

4) Bantuan Seluruh Dunia

Negara-negara berkembang dapat mengakses bantuan keuangan melalui kemitraan internasional dan bantuan asing. Organisasi internasional seperti Bank Dunia dan IMF menawarkan hibah dan pinjaman yang dapat digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur dan program sosial.

b. Tantangan

1) Keterbatasan Pendapatan Pajak

Salah satu kendala terbesar dalam pengumpulan pajak adalah sektor informal yang mendominasi perekonomian. Lebih dari 50% tenaga kerja bekerja di sektor informal, yang sulit diakses oleh sistem pajak.

2) Ketergantungan pada Bantuan Luar Negeri

Ketergantungan ini sering kali membatasi kemampuan pemerintah untuk memilih prioritas anggarannya.

3) Korupsi dan Kerusakan Politik

Komponen utama penerapan kebijakan fiskal yang berhasil adalah stabilitas politik. Kerusakan politik sering kali mempersulit pelaksanaan inisiatif pembangunan di Kenya. Namun, korupsi memperburuk kesenjangan sosial dan menurunkan efektivitas alokasi anggaran di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

4) Defisit Infrastruktur

Distribusi keuntungan kebijakan fiskal terhambat oleh kekurangan infrastruktur di banyak tempat, terutama di pedesaan.

5) Pengaruh Luar

Negara-negara berkembang rentan terhadap perubahan ekonomi dunia. Misalnya, penurunan harga komoditas penting seperti minyak dan gas di Indonesia dapat menurunkan pendapatan pemerintah dan berdampak pada kapasitas pemerintah untuk mendanai program-program sosial.

5. KESIMPULAN

Baik dalam sistem ekonomi tradisional maupun Islam, kebijakan fiskal merupakan instrumen penting bagi manajemen ekonomi. Sasaran utama kebijakan fiskal dalam sistem tradisional adalah untuk mendorong perluasan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan menghasilkan kesejahteraan material melalui perpajakan dan belanja publik. Namun, metode ini sering kali mengabaikan aspek sosial dan spiritual dari kesejahteraan. Di sisi lain, kebijakan fiskal ekonomi Islam menggabungkan norma-norma syariah, yang menekankan keadilan sosial yang berkelanjutan dan keselarasan antara dimensi material dan spiritual.

Instrumen fiskal Islam seperti kharaj, jizyah, sedekah, infaq, dan zakat sangat penting untuk mengurangi kemiskinan dan mendistribusikan kembali kekayaan. Telah dibuktikan bahwa zakat, sebuah kewajiban agama, secara signifikan meningkatkan kesejahteraan mustahik dan menurunkan kemiskinan. Sementara itu, sedekah dan infaq memberikan solidaritas sosial sebagai komponen sukarela. Bagi non-Muslim, kharaj dan jizyah menawarkan opsi pajak yang wajar tanpa melanggar hukum syariah.

Penerapan prinsip-prinsip fiskal Islam di Indonesia dapat mendukung pendekatan yang lebih bermoral dan inklusif terhadap pembangunan ekonomi. Contoh nyata kebijakan fiskal yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam adalah penyusunan APBN yang didasarkan pada hierarki kebutuhan, efisiensi pengeluaran, dan penekanan pada bidang-bidang prioritas seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan bantuan untuk UMKM. Lebih jauh, pengelolaan fiskal saat ini harus mampu mengatasi masalah-masalah seperti defisit anggaran, inflasi, dan pengembangan sumber daya manusia.

DAFTAR REFERENSI

- Aini, I. (2019). *Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam*. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(2). <https://doi.org/10.32694/010760>
- Arfah, T. (2020a). *Keuangan publik dalam perspektif ekonomi Islam*. *Jurnal ISLAMIKA*, 3(2).
- Febriana, M. F., & Mulyawan, S. (2024). *Kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi Islam serta relevansinya di negara Indonesia*. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen dan Ekonomi Syariah*, 2(2), 39–52. <https://doi.org/10.61132/nuansa.v2i2.885>
- Ficeroy, R. (2024). *Pengaruh faktor ekonomi makro terhadap kinerja saham di pasar modal global*. *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.59966/ekalaya.v2i1.723>
- Hasan, A., Nurfitriani, A., Rachman, H. P., Putra, R. W., Fadhillah, M. F., Ekonomi, F., Bisnis, D., Hidayatullah, S., & Abstract, J. (2024). *Peran pemerintah dalam memajukan ekonomi syariah di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 187–196. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13853624>
- Hasan, A., Sovialencia, R. S., Wulandari, W., Zahro, F., & Hidayati, A. N. (2025). *Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam*. *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal*, 3(1).
- Husna, H., Nasution, A. K., Afriliani, I., & Fitriana, N. (n.d.). *Analisis keseimbangan ekonomi tiga sektor dalam perspektif makro ekonomi* (Vol. 2).
- Indah, N., Aruan, M., Hutagalung, I., Purba, B., Ekonomi, F., Sarjana, J., Ekonomi, I., & Medan, U. N. (2023). *Analisis dampak teori Keynes dalam mengatasi krisis ekonomi melalui kebijakan fiskal*. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/XX..XXXXX/Jimea>
- Miskiyah, Z., Zunaiddi, A., Almustofa, S., & Suhardi, M. (2022). *Kebijakan fiskal dalam perspektif ekonomi makro Islam*. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 69–83. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.33>
- Mutiara, A., Islam, U., Sumatera, N., Imel, U., Siregar, S., Negeri, U. I., Utara, S., & Afriyanti, Y. (2024). *Peran kebijakan fiskal dalam mendukung stabilitas ekonomi makro*, 2(7), 212–226. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i7.1868>
- Niru, O., & Sinaga, A. (2017). *Reformasi pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan negara* (Vol. 8, Issue 1).
- Siregar, O. K. (2022). *Kebijakan fiskal dan fertilitas di Indonesia*. <https://doi.org/10.31237/osf.io/rhw4z>
- Swasta, D., & Febriyanto, S. A. (n.d.). *Peran zakat produktif dalam kesejahteraan ekonomi masyarakat: Komparasi badan amil zakat milik negara dan swasta*. *Journal of Islamic Law Studies*, 4(2). <https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol4/iss2/9>
- Utami, N. F., Aristianti, D. A., Kholil, A., Ardifta, S., Institut, S. H., Islam, A., Metro, N., Ki, J., Dewantara, H., Rejo, B., & Batanghari, K. (2025). *Perbedaan kebijakan fiskal dalam*

ekonomi konvensional dan perspektif Islam. JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 3(5), 1063–1073.

Wahyudi Zein, A., & Gusvi, S. N. (n.d.). *Ekonomi publik pada analisis dampak program perlindungan sosial terhadap penurunan angka kemiskinan di perkotaan.* <https://doi.org/10.61132/anggaran.v3i2.1356>